



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KELAUTAN & PERIKANAN

**KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2022**



LAWORO, APRIL 2021



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Renja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 ini dapat diselesaikan, sebagai pedoman yang memandu gerak langkah Dinas Kelautan dan Perikanan dalam berkontribusi mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.

Sesungguhnya Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak hal yang mungkin belum tercakup dalam dokumen ini. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan kritik yang dinamis dan konstruktif dari berbagai pihak, untuk perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renja SKPD ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Harapan kami semoga kita sama-sama menyatukan gerak langkah untuk perwujudan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lebih baik dan profesional guna mendukung perwujudan visi Kabupaten Muna Barat, yaitu; **TERWUJUDNYA MASYARAKAT MUNA BARAT YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING DENGAN DILANDASI OLEH NILAI-NILAI RELIGIUS”**

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU	8
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU	8
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	15
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	21
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	34
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	34
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD	37
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN	37
BAB IV PENUTUP	47



DAFTAR TABEL

<i>No</i>	<i>Teks</i>	<i>Nomor</i>
Tabel T-C 29	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD dan Pencapaiannya Tahun 2018	10
Tabel T- C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat	14
Tabel 2.2.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat	16
Tabel T-C 31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Muna Barat	22
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan pada MUSRENBANG Tingkat Kecamatan Tahun 2020 Kabupaten Muna Barat	32

**RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2021**



PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Sistematika Penulisan

1.1. LATAR BELAKANG

Kebijakan Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2022, akan disinergiskan dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak terlepas dari **Rancangan Teknokratis RPJMN 2022-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022**.

Berdasarkan hal tersebut, pembangunan sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kondisi fisik dan biologis lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil juga tidak kalah pentingnya pertimbangan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Secara fisik Kabupaten Muna Barat merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi perairan laut seluas sekitar 1.456,87 km² memiliki 34 buah pulau kecil 12 diantaranya adalah merupakan desa - desa pulau. Pulau-pulau tersebut di kelilingi oleh laut dengan panjang garis pantai 192,03 km dan luas daratan pulau-pulainya 4.410,298 ha. Berdasarkan kondisi tersebut maka salah satu arah kebijakan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat lebih diarahkan pada pengembangan budidaya perikanan, baik budidaya laut budidaya air payau maupun kegiatan budidaya air tawar, pengembangan perikanan tangkap yang berwawasan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penataan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terintegrasi serta perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan.

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bidang kelautan dan perikanan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan.

Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun.
2. Menciptakan kepastian pengambilan kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat, hal ini sejalan dengan pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten dan kota merupakan bagian dari provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.

MUSRENBANG berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi dan sinergitas sasaran, arah

kebijakan program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Muna Barat.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan Rencana Strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat sebagai Dinas yang menangani urusan bidang kelautan dan perikanan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD mengacu pada tata cara dan tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja (RENJA) bidang kelautan dan perikanan dengan maksud menyediakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2022.

Rencana Kerja (RENJA) bidang Kelautan dan Perikanan sebagai Penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muna Barat merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata, perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang kelautan dan perikanan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2022, dengan memperhatikan hasil musrenbang kecamatan dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Muna Barat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau – Pulau Kecil;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal (SPM);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;

26. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat dimaksudkan untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh SKPD dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2022 dengan harapan dapat mendorong partisipasi bagi seluruh *stakeholder* sektor kelautan dan perikanan. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat adalah :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai penjabaran operasional Rencana Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat pada Tahun Anggaran 2022.
2. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat *stakeholder* sektor kelautan dan perikanan dalam menentukan arah dan acuan pelaksanaan kerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2022.
3. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaiannya
- 2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP



HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2021 serta isu-isu strategis yang perlu direspon pada tahun 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Sebagaimana Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2019 yaitu meliputi 3 (tiga) hal yaitu : kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok yaitu :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
5. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;



RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

6. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable devolpment*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, masalah-masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
7. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan melalui peraturan bupati, dinas kelautan dan perikanan serta capaiannya tahun anggaran 2021 dapat diuraikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan capaian SKPD sampai dengan tahun 2021, dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang direncanakan dalam peraturan bupati yang dilaksanakan SKPD (dinas kelautan dan perikanan) realisasi kegiatannya dapat terpenuhi. Keterbatasan sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya target capaian kegiatan SKPD, baik secara internal maupun eksternal (SKPD terkait).

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

Tabel T-C. 2.9. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 Kabupaten Muna Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/OUTPUT)	Target Kinerja Capaian	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Kegiatan SKPD Tahun 2020	Realisasi Kegiatan SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d thn berjalan (thn 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Mbps yang dibayarkan Jumlah volume air yang dibayarkan (m3 air)	1 paket	1 paket	1 paket	100%			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara / diperpanjang perizinannya	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemenuhan Jasa Administrasi Keuangan (%)	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemenuhan Alat Kebersihan dan bahan pembersih Kantor (%)	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor (%)	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan bahan cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	1 paket	100%			
	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	1 paket	1 paket	1 paket	100%			
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat yang dipenuhi	1 paket	1 paket	1 paket	100%			
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti	1 paket	1 paket	1 paket	100%			

**RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2022**

	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemenuhan Jasa Administrasi Keuangan (%)	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah yang diikuti	1 paket	1 paket	1 paket	100%			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan roda dua							
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang tersedia	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang tersedia	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional / lapangan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan Pemeliharaan /penataan lingkungan gedung kantor	Jumlah dan jenis lingkungan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%			
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Ketersediaan Pakaian Dinas	100 %	100%	100%	100%			
	Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100%	100%	100%	100%			
4	Program Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan	Presentase Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	Jumlah dan Jenis Prasarana Perikanan budidaya	100%	8 paket	8 paket	100%			
5	Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap	Presentase Jumlah sarana dan prasarana Perikanan Tangkap	100%	100%	100%	100%			
	Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Nelayan	Jumlah kelompok nelayan yang kapasitas kelembagaanya meningkat	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	100%			
	Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap	100%	4 paket	4 paket	100%			

**RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2022**

	Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil untuk nelayan	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana pemberdayaan usaha skala kecil untuk nelayan	100%	2 paket	2 paket	100%			
	Pengelolaan Akses Area Perikanan	Tersedianya Kawasan PAAP	100%	2 kawasan	2 kawasan	100%			
6	Program Penataan Kawasan Budidaya dan Pembenihan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana di Kawasan Budidaya	100 %	2 Paket	2 Paket	100%			
	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Tambak	Jumlah Saluran Tambak yang Dibangun/Direhabilitasi	100%	1 paket	1 paket	100%			
7	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengolah dan Pemas Hasil Perikanan	Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang dilatih	100 %	1 Keg	1 Keg	100%			
	Kegiatan Pelatihan pembuatan olahan hasil perikanan	Jumlah Pelatihan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
8	Program Penguatan Daya Saing Produk dan Perizinan Usaha Perikanan	Presentase Jumlah sarana dan prasarana Pengolahan Ikan	100 %	2 Paket	2 Paket	100%			
	Kegiatan Sosialisasi perizinan usaha perikanan	Jumlah kegiatan sosialisasi perizinan usaha Perikanan	100%	1 Keg	1 Keg	100%			
9	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembudidaya Ikan	Jumlah keg kelompok nelayan yang dibina/dibentuk	100 %	1 Keg	1 Keg	100%			
	Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang dibentuk dan dibina	100%	2 Keg	2 Keg	100%			
10	Program Pengembangan Data dan Informasi	Jumlah Dokumen Statistik Kelautan dan Perikanan	3 Dok	4 Dok	4 Dok	100%			
	Kegiatan Pameran pembangunan dalam rangka halo sultra	Jumlah Kegiatan Pameran pembangunan dalam rangka halo sultra	100%	1 Keg	1 Keg	100%			
	Kegiatan Pusat data dan informasi kelautan dan perikanan	Dokumen data dan informasi kelautan dan perikanan	100%	1 paket	1 paket	100%			
	Kegiatan Halo Mubar	Jumlah Kegiatan	100%	1 Keg	1 Keg	100%			
11.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP					58	58	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% barang milik daerah yang tersedia					100%	100%	100%

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Keberadaan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah yang tepat waktu					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% ASN OPD yang kompeten					100%	100%	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% barang administrasi umum yang tersedia					100%	100%	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100%	100%	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi					100%	100%	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% barang milik daerah yang terpelihara dengan baik					100%	100%	100%
12.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	% peningkatan produksi perikanan tangkap					100%	100%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Penangkapan Ikan yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					20 orang	20 orang	100%
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					100%	100%	100%
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan					100%	100%	100%
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan					100%	100%	100%
	Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terdaftar					100%	100%	100%
13.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	% peningkatan produksi perikanan budidaya					10%	10%	100%

**RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2022**

	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan					20 orang	20 orang	100%
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan					100%	100%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	% Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					100%	100%	100%
14.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	% usaha perikanan sesuai aturan/izin					100%	100%	100%
	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya					50 kali	50 kali	100%
15.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	% peningkatan produksi olahan hasil perikanan					5%	5%	100%
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dan Jenis Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dan Jenis Fasilitas Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang tersedia					4 Jenis	4 Jenis	100%

**RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2022**

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Muna Barat

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Produksi perikanan Tangkap (ton)			9.302,40	9.791,40	10.770,54	13.445,67	9.301,59	11.369,10	12.805,40	14.117,96	
	Produksi perikanan Budidaya (ton)			4.587,59	5.999,79	7570,67	16.263,31	9.774,85	13.956,81	15.488,87	17.076,48	
	Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Skala Kecil dan Mikro (ton)			87,40	89,94	94,44	115,31	85,65	97,69	111,95	118,77	
	Konsumsi ikan (kg)			3.529.566	3.665.086	3.738.388	3.794.464	3.557.321	3.684.983	3.758.683	3.833.857	
	bina kelompok nelayan			380	402			53	72			
	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)			9.301,59	11.369,10			3.932,54	3.780,92			
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (ton)			9.301,59	11.369,10			15.000	15.000			
	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial Kawasan lindung perairan (Ha)			145.687	145.687			1.593,6	2.987,2			
	Nilai tukar nelayan							97,62	102,54			

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Secara umum permasalahan yang ada di lingkup kerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat secara garis besar terbagi atas 3 (tiga) yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu modal utama pengembangan bidang kelautan dan perikanan adalah tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, beriman, takwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional dan berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat kerja yang tinggi melalui suatu sistem pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidang kelautan dan perikanan yang terencana untuk mampu memiliki kompetensi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu diperlukan pengembangan SDM, agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM.

Dalam perkembangannya kedepan, SDM harus memiliki standar kapasitas dan kompetensi yang baik untuk meningkatkan kualitas SDM. Hal ini untuk meningkatkan daya saing di tingkat global. Secara internal permasalahan yang terkait dengan kualitas Sumberdaya Manusia di bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Muna Barat (aparatur SKPD, nelayan, pembudidaya ikan dan pengelolah hasil perikanan) meliputi :

- Sarana dan prasarana perkantoran masih sangat-sangat terbatas;
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat sangat kurang.
- Tingkat pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan relatif masih rendah;
- Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan belum optimal.

Dengan segala keterbatasan tersebut maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam artian SDM yang memiliki unsur-unsur pengetahuan, keterampilan, peran sosial, citra diri, perilaku dan motivasi sesuai dengan pekerjaannya dan jenjang jabatannya.

Permasalahan lain yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Muna Barat yang meliputi :

- Produktivitas perairan mengalami penurunan akibat degradasi habitat dan ekosistem;
- Produktivitas nelayan hingga saat ini masih rendah;

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

- Penyediaan sarana dan prasarana produksi yang belum optimal;
- Praktek penangkapan ikan yang *destruktive* yang masih terus berlangsung;
- Konflik pemanfaatan sumberdaya masih sering terjadi;
- Infrastruktur penunjang pada sentra-sentra produksi (jalan, listrik, air bersih, sanitasi) belum optimal;

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan selengkapnya dapat dilihat pada table 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pelayanan Administrasi SKPD	Rendah	Administrasi, sarana dan prasarana kantor	Peningkatan kualitas Pendidikan PNS	Koordinasi lintas sektoral	Terbatasnya sarana dan prasarana kantor
2. Pendidikan nelayan	Rendah	Tingkat pendidikan formal nelayan	Koordinasi lintas sektor dengan dinas pendidikan	Kebijakan pemerintah pusat & Pemda pada sektor pendidikan	Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan kemampuan untuk mengembangkan diri masih terbatas.
3. Aparatur Pengawas Perikanan (PPNS)	Tidak Ada	Rasio luas perairan dengan jumlah pengawas perikanan	Pembinaan pegawai yang disiapkan untuk menjadi PPNS perikanan	Dukungan pelatihan dari Kementerian kelautan dan Perikanan	Aparat Bidang Pengawasan hanya 2 orang serta Sarana Pengawasan yang tidak ada
4. Sumberdaya perairan	Degradasi	Jumlah hasil tangkapan berkurang, Wilayah pengangkapan semakin jauh	Pembinaan dan penataan dalam pemanfaatan sumberdaya yang sustainable	Koordinasi lintas sektor, serta dukungan pendanaan pusat dan provinsi	Kualitas sumberdaya perairan semakin terdegradasi.
5. Produktifitas nelayan	Belum optimal	Hasil tangkapan nelayan dan sarana penangkapan	Penyediaan armada perikanan	Dukungan pembiayaan pemprov dan pemerintah pusat Akses Permodalan bagi nelayan Sistem tengkulak yang masih berkembang	produktifitas para nelayan belum optimal
6. Sarana dan prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap dan kegiatan usaha perikanan	Kurang	Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap dan keg usaha perikanan	Penyediaan sarana dan prasaran perikanan budidaya, perikanan tangkap dan keg usaha perikanan	Dukungan pembiayaan baik pemprov maupun kementerian kelautan dan perikanan	Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan budidaya dan tangkap serta kurangnya kegiatan usaha perikanan
7. Praktek Penangkapan Ikan Destruktif	Tinggi	Kerusakan Terumbu karang, menurunnya hasil tangkapan	Pengawasan dan pembinaan, mata pencaharian alternatif	Koordinasi lintas sektor, pengawasan bersama	Praktek destruktive fishing masih berlangsung.
8. Konflik Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Tinggi/meningkat	Tingkat konflik dipesisir dan laut	Regulasi pemanfaatan ruang yang kuat	Kerjasama dan dukungan lintas sektor	Konflik dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan masih terjadi
9. Pengawasan, partisipasi masyarakat dan koordinasi	Belum Optimal	Intensitas pengawasan dan tingkat partisipasi masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dan pemberdayaan masyarakat	Kerjasama lintas sektor	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum optimal, disertai rendahnya partisipasi masyarakat serta masih lemahnya kerjasam lintas sektor
10. Infrastruktur pada sentra – sentra produksi	kurang	Sarana Jalan, listrik, sanitasi dan infrastruktur pendukung lain yang terdapat di sentra-sentra produksi	Penetapan wilayah sentra produksi perikanan berdasarkan potensi masing-masing wilayah	Kerjasama lintas sektor (kimpraswil, Perindag dan Koperasi)	Infrastruktur pada kawasan sentra-sentra produksi masih minim

Berdasarkan tabel 2.2, terlihat bahwa aspek kajian yang terkait dengan sumberdaya manusia masih perlu ditingkatkan. Produktivitas nelayan hingga saat ini masih tergolong rendah, Saprasi produksi dan pemasaran hasil perikanan yang masih terbatas serta belum adanya sapras pengawasan.

Sumber daya ikan yang berada di perairan pantai cenderung mengalami penurunan populasi (*overfishing*). Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas adalah degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran perairan baik laut maupun tawar, kegiatan perikanan yang merusak (*destructive fishing*), penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebih (*overfishing*) yang dilakukan secara ilegal seperti penggunaan metode penangkapan ikan dengan bahan peledak, racun, listrik dan obat bius, penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan izin dan yang tidak berizin.

Berdasarkan Isu-isu dan permasalahan yang sudah teridentifikasi maka tantangan dan peluang dalam menjalankan kegiatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Rencana Program Kabupaten Muna Barat adalah :

1. Program Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan) :

a. Permasalahan Pelayanan SKPD :

- Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan kelompok Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan masih rendah.
- Terbatasnya Infrastruktur untuk mendukung kepastian usaha Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana produksi Perikanan budidaya dan Tangkap.
- Teknologi Budidaya dan penangkapan yang diterapkan masih rendah
- Rendahnya kemampuan nelayan dan pembudidaya ikan dalam pengelolaan usaha perikanan yang masih rendah.
- Penurunan produktivitas perairan.
- Teknologi budidaya yg diterapkan masih bersifat tradisional
- Pengolahan dan pemasaran produk belum dikembangkan dengan baik

b. Tantangan :

- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan kelompok
- Rendahnya kemampuan/kapasitas kelembagaan kelompok bagi masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
- Terbatasnya permodalan usaha
- Sarana dan prasarana produksi yang masih kurang
- Akses informasi bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan masih terbatas.

c. Peluang :

- Kegiatan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan cukup tinggi
- Potensi komoditas cukup besar
- Adanya dukungan kebijakan pemerintah
- Minat masyarakat yang bermukim di wil. pesisir & pulau-pulau kecil cukup besar dalam melakukan kegiatan bidang perikanan
- Kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dan pemerintah pusat cukup tinggi

2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dasar usaha perikanan, Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, Program Penguatan Kapasitas Kelompok Usaha masyarakat kelautan dan perikanan dalam pendayagunaan sumberdaya perikanan:

a. Permasalahan Pelayanan SKPD :

- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan usaha budidaya dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
- SDM masyarakat Kelautan dan Perikanan masih rendah.
- Akses informasi bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah serta pemasar hasil perikanan masih terbatas.
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam operasional.
- Rendahnya penegakan peraturan dalam pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan

b. Tantangan :

- Aksesibilitas ke daerah pesisir dan pulau-pulau kecil masih sulit
- Partisipasi masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan yang kurang
- Tingkat pendidikan masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan masih rendah
- Sarana dan prasarana infrastruktur yang kurang
- Kerjasama lintas sektoral
- Data base yang masih minim

c. Peluang :

- Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar
- Komitmen dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat

2. Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Sinergis

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam konteksnya merupakan bidang pembangunan yang sangat kompleks dan banyak memiliki keterkaitan dengan pihak lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelompokan stakeholders dapat di jabarkan sebagai berikut : Pemerintah, swasta dan masyarakat. Gambaran pelaku tersebut mengisyaratkan bahwa setiap upaya dan langkah-langkah pengembangan akan memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak lain.

Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antar pelaku di bidang kelautan dan perikanan dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan program-program pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih terpadu dan terintegrasi menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan. Dinas kelautan dan perikanan membuka peluang keterpaduan pihak swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran. Kondisi keterpaduan antar pihak harus terus di perbaiki, hubungan antar asosiasi profesi perlu terus di tingkatkan demikian pula hubungan pusat dan daerah, serta lembaga ekonomi mikro perlu diberdayakan.

3. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Upaya untuk membangun sektor kelautan dan perikanan kabupaten muna barat saat ini di hadapkan pada suatu dilema, bahwa disatu sisi diharapkan sektor kelautan dan perikanan mampu berperan sebagai sektor unggulan penyumbang PAD di Kabupaten Muna Barat, namun disisi lain tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Keterbatasan anggaran tersebut sebagai konsekuensi menjadi daerah otonom, yang harus mampu membiayai segala kebutuhan daerah, sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten Muna Barat menerapkan skala prioritas untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

Berdasarkan tantangan dan peluang dalam peningkatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam rangka tindak lanjut perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2022 adalah :

1. Bahwa mengingat bentang wilayah Kabupaten Muna Barat yang merupakan wilayah kepulauan dan daratan maka wilayah kerja Dinas Kelautan dan Perikanan hampir mencakup semua wilayah Kabupaten Muna Barat (sekitar 85%), maka diperlukan Program yang langsung dapat bersentuhan dengan usaha bidang kelautan dan perikanan. Dalam rangka pengukuran tingkat kinerja dan capaian Renstra SKPD, maka diperlukan kegiatan “Pemutakhiran Data Base Kelautan dan Perikanan” dengan indikator kinerja yakni adanya dokumen data statisik perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan hasil perikanan dan data kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Data base ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan utama penyusunan perencanaan SKPD.
2. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM *stakeholder* kelautan dan perikanan di Kabupaten Muna Barat, terutama dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan diperlukan kegiatan “Penguatan Kapasitas Usaha Masyarakat Kelautan dan Perikanan, program pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Melalui Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan”. Kegiatan ini sangat diperlukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri, BLH, BAPPEDA, Dinas PU, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungann serta lembaga non-pemerintah sesuai

dengan tupoksinya masing – masing, dalam rangka mempersiapkan kabupaten Muna Barat sebagai kabupaten kepulauan.

3. Dalam rangka peningkatan produksi perikanan budidaya, guna mewujudkan target pertumbuhan produksi pada tahun 2022 yakni diperlukan kerja keras dan anggaran yang memadai untuk menstimulus dan mencapai target-target pertumbuhan tersebut.

Untuk mencegah/mengurangi kerusakan lebih lanjut pada ekosistem pesisir pantai serta *overfishing* perairan pantai, maka diperlukan stimulus untuk mendorong nelayan untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Dalam rangka mengurangi laju degradasi ekosistem pesisir, khususnya mangrove dan terumbu karang diperlukan perlindungan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara teratur dan intensitas yang tinggi. Olehnya itu ditahun 2019 sangat diperlukan pendanaan untuk kebutuhan pengelolaan dan perlindungan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat di lihat pada tabel T-C.31.

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kabupaten Muna Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		2.553.789	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		2.553.851	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP	12 bulan	28.085	1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	12 bulan	28.148	APBD II/DAU
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Dokumen Perencanaan yang tersedia	1 dok	10.502		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Dokumen Perencanaan yang tersedia	1 dok	10.502
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah koordinasi penyusunan Dokumen RKA-OPD	5 kali	1.602		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah koordinasi penyusunan Dokumen RKA-OPD	5 kali	1.602
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-OPD	5 kali	1.052		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-OPD	5 kali	1.052
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah koordinasi penyusunan Dokumen DPA-OPD	5 kali	552		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah koordinasi penyusunan Dokumen DPA-OPD	5 kali	552
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-OPD	5 kali	452		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-OPD	5 kali	452
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen lakip OPD yang disampaikan tepat waktu	24 kali	1.925		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen lakip OPD yang disampaikan tepat waktu	24 kali	1.988
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah rapat evaluasi kinerja internal OPD	12 kali	12.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah rapat evaluasi kinerja internal OPD	12 kali	12.000

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu	12 Bulan	1.791.602	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu	12 Bulan	1.791.602	APBD II/DAU
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah orang penerima gaji dan tunjangan pada tahun berjalan.	20 orang	1.684.202		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah orang penerima gaji dan tunjangan pada tahun berjalan.	20 orang	1.684.202	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan penatausahaan dan verifikasi keuangan OPD	12 Bulan	105.600		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan penatausahaan dan verifikasi keuangan OPD	12 Bulan	105.600	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi OPD	5 kali	400		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi OPD	5 kali	400	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	9 kali	400		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	9 kali	400	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase temuan yang ditanggapi	100 %	200		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase temuan yang ditanggapi	100 %	200	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen Laporan Keuangan Berkala OPD	10 kali	400		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen Laporan Keuangan Berkala OPD	10 kali	400	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah laporan prognosis yang disampaikan tepat waktu	4 dokumen	400		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah laporan prognosis yang disampaikan tepat waktu	4 dokumen	400	
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik	12 Bulan	927	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik	12 Bulan	927	APBD II
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dokumen Kebutuhan barang milik OPD	2 dokumen	200		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dokumen Kebutuhan barang milik OPD	2 dokumen	200	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah barang dan aset milik OPD yang diamankan	100 %	65		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah barang dan aset milik OPD yang diamankan	100 %	65	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi inventaris barang	4 kali	200		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi inventaris barang	4 kali	200	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan barang milik daerah	5 kali	224		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan barang milik daerah	5 kali	224	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dokumen laporan barang yang direkonsiliasi	1 dokumen	223		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dokumen laporan barang yang direkonsiliasi	1 dokumen	223	

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

SKPD													
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dokumen barang milik OPD yang tertata dengan baik	1 dokumen	16		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dokumen barang milik OPD yang tertata dengan baik	1 dokumen	16	
	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase pengelolaan pendapatan yang teradministrasi dengan baik	12 bulan	2.590	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase pengelolaan pendapatan yang teradministrasi dengan baik	12 bulan	2.613	APBD II
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase sosialisasi dan penyebarluasan informasi retribusi	90 %	1.545		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase sosialisasi dan penyebarluasan informasi retribusi	90 %	1.545	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase jumlah obyek retribusi terinventarisir	90 %	1.023		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase jumlah obyek retribusi terinventarisir	90 %	1.023	
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase pengelolaan data retribusi daerah	90 %	23		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase pengelolaan data retribusi daerah	90 %	23	
	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik	12 bulan	20.493	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik	12 bulan	20.493	APBD II
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas ASN beserta atribut dan kelengkapannya yang tersedia	20 pasang	20.000						20.000	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase pengelolaan data administrasi kepegawaian	100 %	23		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase pengelolaan data administrasi kepegawaian	100 %	23	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan persentase pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 kali	400		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan koordinasi dan persentase pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 kali	400	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja ASN	12 kali	70		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja ASN	12 kali	70	
	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan	12 bulan	593.189	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan	12 bulan	607.088	APBD II
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 paket	5.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 paket	5.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 paket	57.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 paket	57.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang tersedia	1 paket	70.000				Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang tersedia	1 paket	70.000	

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase pemenuhan bahan cetak dan penggandaan	100 %	2.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase pemenuhan bahan cetak dan penggandaan	100 %	2.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	12 eks	16.920		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	12 eks	16.920	
		Penyediaan Bahan/Material	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan jenis Bahan / Material yang tersedia	1 paket	25.678		Penyediaan Bahan/Material	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan jenis Bahan / Material yang tersedia	1 paket	25.677	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti	50 kali	416.591		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti	50 kali	416.591	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem berbasis elektronik pada OPD	100 %	13.900		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem berbasis elektronik pada OPD	100 %	13.900	
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	12 bulan	67.600	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	12 bulan	67.600	APBD II
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah daya listrik yang dibayarkan (KWh)	1 paket	10.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah daya listrik yang dibayarkan (KWh)	1 paket	10.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	57.600		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	57.600	
	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / jabatan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK	12 bulan	35.381	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / jabatan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK	12 bulan	35.381	APBD II
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / jabatan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK		10.000			Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / jabatan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK		10.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional / lapangan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK	1 paket	5.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional / lapangan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK	1 paket	5.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan jenis perlatan dan mesin yang terpelihara	1 paket	3.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan jenis perlatan dan mesin yang terpelihara	1 paket	3.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	1 paket	12.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	1 paket	12.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	1 paket	5.381						5.381	

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

		Lainnya										
2		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% peningkatan produksi perikanan tangkap	12 bulan	1.164.350	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% peningkatan produksi perikanan tangkap	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	1.999.350	12 bulan
	1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% pengelolaan penangkapan ikan yang tercatat	1 paket	585.800	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% pengelolaan penangkapan ikan yang tercatat		1 Paket 1.779.350	APBD II
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Data dan Informasi Perikanan tangkap	1 dokumen	38.800	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Data dan Informasi Perikanan tangkap		1 dokumen 38.800	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2 Paket	547.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		2 Paket 1.107.000	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Sarana Usaha Perikanan Tangkap	5 Paket	358.550	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Sarana Usaha Perikanan Tangkap		5 Paket 633.550	
	2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% Nelayan Kecil yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan	1 Paket	84.000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% Nelayan Kecil yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan		1 Paket 84.000	APBD II
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	4 Paket	34.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		4 Paket 34.000	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	4 Paket	50.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		4 Paket 50.000	
	3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Paket	136.000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		1 Paket 136.000	APBD II
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan TPI	2 Paket	136.000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan TPI		2 Paket 136.000	

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% peningkatan produksi perikanan budidaya	12 bulan	599.900	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% peningkatan produksi perikanan budidaya	12 bulan	999.900	
1.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% Pembudidaya Ikan Kecil yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan		30.000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% Nelayan Kecil yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan		30.000	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Pembudi Daya Ikan yg meningkat kapasitasnya	40 orang	30.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Pembudi Daya Ikan yg meningkat kapasitasnya	40 orang	30.000	
2.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		569.900	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		969.900	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	1 dokumen	14.900	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	1 dokumen	14.900	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan yang tersedia	4 Paket	200.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan yang tersedia	4 Paket	600.000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan yang tersedia	4 Paket	350.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan yang tersedia	4 Paket	355.000	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah pembinaan/pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1 Paket	5.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah pembinaan/pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1 Paket	5.000	
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% peningkatan produksi perikanan	1 Paket	10.000	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% peningkatan produksi perikanan	1 Paket	10.000	
1.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1 Paket	10.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1 Paket	10.000	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Pemantauan/Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1 Paket	5.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Pemantauan/Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	1 Paket	5.000	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Pemantauan/Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,	1 Paket	5.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Pemantauan/Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,	1 Paket	5.000	

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

			dan Genangan Air Lainnya			Kabupaten/Kota		dan Genangan Air Lainnya			
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% peningkatan produksi olahan hasil perikanan		375.600	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	% peningkatan produksi olahan hasil perikanan		375.600	
1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	11.000	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	11.000	DAU
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	1 dokumen	11.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	1 dokumen	11.000	
2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3 Keg	109.600	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3 Keg	109.600	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Bimtek/Pelatihan/Keg	3 Keg	109.600	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah Bimtek/Pelatihan/Keg	3 Keg	109.600	
3.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang bermutu	4 paket	255.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang bermutu	4 paket	255.000	DAU
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Fasilitas Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang tersedia	4 paket	255.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah/Kota	Desa Waukuni Kec. Sawerigadi	Jumlah dan Jenis Fasilitas Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang tersedia	4 paket	255.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam perumusan program dan kegiatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2022 telah mempertimbangkan berbagai macam usulan para pemangku kepentingan dan berdasarkan hasil pengumpulan data dilapangan serta pengamatan saat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan.

Proses perumusan program/kegiatan telah dilakukan berdasarkan data-data yang di himpun melalui observasi dilapangan dan juga langsung melakukan diskusi dengan pelaku usaha perikanan budidaya, tangkap, pemasaran dan pengolahan hasil serta tokoh-tokoh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain rumusan program tersebut juga kami telah mengumpulkan isu-isu yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, terutama soal penurunan produktifitas perairan akibat rusaknya ekosistem penting pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terkait dengan hasil observasi yang dikumpulkan, maka dilakukan penelaahan usulan program/kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat saat melakukan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan yang di fasilitasi oleh BAPEDA Kabupaten Muna Barat. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya di bahas dan di kaji secara bersama-sama melalui pertemuan dengan seluruh kepala bidang dan staf lingkup dinas kelautan dan perikanan kabupaten muna barat. Dalam pertemuan ini membahas Rencana kerja SKPD tahun 2022 dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang telah di kumpulkan dan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan terkait dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Untuk penyajian tentang penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat di lihat pada tabel T-C.32.

**RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2022**

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tahun 2022 Kabupaten Muna Barat.

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pembuatan Tambak	Desa Lemoambo	Luasan tambak yang tercetak	10 Ha	
2	Pengembangan Tambak	Desa Lakawoghe	Luasan tambak yang tercetak	10 Ha	
3	Pengadaan Perahu Nelayan	Desa Maginti	Jumlah Perahu Nelayan yang tersedia	80 Unit	
4	Pengadaan Bubu Rajungan	Desa Bangko	Jumlah Bubu Rajungan yang tersedia	5.000 Unit	
5	Pengadaan Jaring Ikan Dasar	Desa Maginti	Jumlah Jaring Ikan Dasar yang tersedia	150 Pis	
6	Pembuatan Jalan Nelayan	Desa Masara	Panjang jalan usaha yang terbangun	1.500 m	
7	Pengadaan Alat Tangkap Nelayan	Desa Santiri	Jumlah alat tangkap yang tersedia	50 Unit	
8	Pengadaan Mesin/Perahu	Desa Bero	Jumlah mesin/perahu yang tersedia	20 Unit	
9	Pembuatan Tambak Air Tawar	Desa Waulai	Luasan tambak yang tercetak	2 Ha	
10	Pengadaan Jaring Kepiting Rajungan	Gala	Jumlah Jaring rajungan yang tersedia	1 Paket	
11	Pengadaan Jaring Kepiting	Desa Maginti	Jumlah Jaring rajungan yang tersedia	200 Pis	
12	Bantuan Alat Tangkap	Desa Kangkunawe	Jumlah alat tangkap yang tersedia	200 KK	
13	Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar	Wuna	Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia	10.000 Ekor	
14	Pengadaan Bubu Ikan	Desa Maginti	Jumlah bubu ikan yang tersedia	100 Unit	
15	Pengadaan Bubu Kepiting	Desa Maginti	Jumlah bubu kepiting yang tersedia	300 Unit	
16	Pengadaan Bibit Rumput Laut	Desa Kangkunawe	Jumlah bibit rumput laut yang tersedia	100 KK	
17	Pengadaan Alat Pancing Rawai	Desa Waukuni	Jumlah alat pancing rawai yang tersedia	1 Paket	
18	Pengadaan Jaring Ikan Rajungan	Desa Bangko	Jumlah Jaring rajungan yang tersedia	2.000 Pis	
19	Pengadaan Mesin Katinting	Desa Maginti	Jumlah mesin katintin yang tersedia	80 Unit	
20	Pengadaan Perahu Fiber	Desa Kangkunawe	Jumlah perahu fiber yang tersedia	100 KK	
21	Pengadaan Perahu Fiber	Desa Bangko	Jumlah perahu fiber yang tersedia	70 Unit	
22	Bantuan Rumpon	Desa Kangkunawe	Jumlah rumpon yang tersedia	1 Paket	
23	Bantuan Bibit Ikan Air Tawar	Desa Barakkah	Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia	10.000 Ekor	
24	Pengadaan Bibit Ikan Mas	Desa Abadi Jaya	Jumlah bibit Ikan Mas yang tersedia	1 Klp	
25	Saprodi Tambak	Desa Barakkah	Jumlah dan jenis saprodi tambak yang tersedia	174 Ha	
26	Bantuan Benih Udang	Desa Barakkah	Jumlah benur udang yang tersedia	174 Ha	
27	Bantuan Bibit Ikan Air Tawar	Desa Barakkah	Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia	174 Ha	
28	Bantuan Mesin Katinting	Desa Bangko	Jumlah mesin katintin yang tersedia	30 Unit	
29	Pengadaan Sero	Desa Maginti	Jumlah sero yang tersedia	2 Unit	

**RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2022**

30	Alat Tangkap Nelayan/Pukat, Bagang dan Bubu Rajungan	Desa Bero	Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia	50 Unit	
31	Pengadaan Mesin/Perahu	Desa Tiga	Jumlah mesin perahu yang tersedai	20 Unit	
32	Pengadaan Bibit Rumput Laut	Desa Maginti	Jumlah bibit rumput laut yang tersedia	500 kg	
33	Pengadaan Mesin/Perahu	Desa Santigi	Jumlah mesin perahu yang tersedai	20 Unit	
34	Tangkap Nelayan/Pukat, Bagang dan Bubu Rajungan	Desa Tiga	Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia	50 Unit	
35	Pengadaan Mesin/Perahu	Desa Santiri	Jumlah mesin perahu yang tersedai	20 Unit	
36	Pengadaan Mesin/Perahu	Desa Tasipi	Jumlah mesin perahu yang tersedai	20 Unit	
37	Pengadaan Mesin/Perahu	Desa Mandike	Jumlah mesin perahu yang tersedai	20 Unit	
38	Tangkap Nelayan/Pukat, Bagang dan Bubu Rajungan	Desa Santigi	Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia	50 Unit	
39	Tangkap Nelayan/Pukat, Bagang dan Bubu Rajungan	Desa Tasipi	Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia	50 Unit	
40	Tangkap Nelayan/Pukat, Bagang dan Bubu Rajungan	Desa Mandike	Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia	50 Unit	
41	Bantuan Sero	Desa Latawe	Jumlah sero yang tersedia	10 Unit	
42	Bibit Ikan Air Tawar (Nila)	Desa Katangana	Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia	1.000 Ekor	
43	Pengadaan Mesin/Perahu		Jumlah mesin perahu yang tersedai	20 Unit	
44	Bantuan Perahu Fiber 1 GT + Peralatan Nelayan	Desa Latawe	Jumlah Perahu Fiber 1 GT + Peralatan Nelayan yang tersedia	10 unit	
45	Alat Tangkap Nelayan/Bubu Rajungan	Desa Tondasi	Jumlah dan jenis alat tangkap yang tersedia	1.000 Buah	
46	Bantuan Bibit Ikan Air Tawar	Desa Sangia Tiworo	Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia	6 Klp	
47	Pembuatan Kolam Air Tawar	Desa Kasimpa Jaya	Luas kolam air tawar yang tercetak	2 Ha	
48	Bantuan Bibit Ikan Air Tawar	Desa Kasimpa Jaya	Jumlah bibit ikan air tawar yang tersedia	10.000 Ekor	

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2022

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Keterkaitan Kebijakan Prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta Program dan Kegiatan pada SKPD Dinas Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Kebijakan				Ket
	Program dan kegiatan OPD	Kabupaten	Provinsi	Nasional	
				Peningkatan Produksi pangan	

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menjabarkan melalui Misinya yaitu : “ Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan.” Terkait dengan kebijakan tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yaitu memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Untuk mewujudkan RKP tersebut maka kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

2. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak harus berdasarkan Money follow fonction, tetapi Money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata.
3. Nomenklatur kegiatan harus sejalan dengan visi dan misi pembangunan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan kewenangannya.

Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dengan cara pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaulat, mandiri dan berkelanjutan yaitu meningkatkan dan menyediakan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, pemasaran, pengawasan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan serta konservasi.

Visi pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara 2019-2023 adalah **“Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat “**

Untuk melaksanakan visi tersebut dijabarkan melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas Usaha Perikanan, Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perikanan, Peningkatan Kualitas dan Keamanan Produk Perikanan, Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Ikan, serta Pengelolaan SDKP secara Berkelanjutan. Terkait dengan kebijakan tersebut di atas maka pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam menjalankan pembangunan mengacu pada arahan visi misinya sebagai berikut :

Visi : **“ Terwujudnya Masyarakat Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif dan Berdaya Saing dengan dilandasi oleh Nilai-Nilai Religius.”** Yang di implementasikan melalui lima kata kunci yaitu **“Sejahtera, Demokratis, Produktif, Berdaya Saing dan Religius”**. Untuk menjabarkan visi tersebut maka Misi pembangunan yang akan di lakukan adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Kreatif, Sehat, Produktif, Inovatif, berdaya saing dan berbudi pekerti luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan keagamaan
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan melalui optimalisasi sentra-sentra produksi pertanian dan perikanan dalam arti luas

4. Mengembangkan potensi wisata dan keragaman budaya daerah sesuai dengan kearifan lokal
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.

Sejalan dengan telaah beberapa kebijakan visi dan misi KKP RI, DKP Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Muna Barat, maka mengacu pada potensi wilayah Kabupaten Muna Barat, dinas kelautan dan perikanan sebagai dinas teknis yang berkepentingan membangun kabupaten Muna Barat di bidang kelautan dan perikanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, akan di implementasikan melalui visi dan misinya sebagai berikut :

Visi : “ **Menjadikan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Muna Barat yang Sejahtera, Demokratis, Produktif dan Berdaya Saing**”. Visi tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Muna Barat mempunyai potensi yang sangat besar di bidang kelautan dan perikanan. salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui peningkatan kinerja :

1. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam bidang perikanan dan kelautan
2. Meningkatkan hasil produksi dan produktivitas masyarakat perikanan
3. Mendorong kinerja pelaku bidang perikanan dan kelautan untuk lebih professional dan tangguh sehingga dapat bersaing dengan daerah lain.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat melaksanakan MISI ketiga, yaitu : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis minapolitan;

Misi keempat yaitu : Mengembangkan potensi wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal serta

MISI kelima yakni : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2017 – 2022). Berikut tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Muna Barat tahun 2017 – 2022 yaitu :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan dengan sasaran adalah : Meningkatnya Produksi Perikanan;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan sasarannya adalah : Meningkatnya akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat akan melaksanakan serangkaian program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun Anggaran 2022, sebagaimana termuat dalam Lampiran 1. Rumusan program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan tersebut, telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pencapaian Visi Misi Dinas Kelautan dan Perikanan
- b. Pengentasan Kemiskinan
- c. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah
- d. Pengembangan Daerah Terisolir
- e. Mengurangi Laju Degradasi Lingkungan Pesisir
- f. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan tersebut disajikan sebagaimana Tabel T – C.33. berikut :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Muna Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				5.938.701.410				6.532.571.551
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.553.851.410				2.803.317.176
3 25 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP			28.148.000				30.962.800
3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dan Jenis Dokumen Perencanaan yang tersedia	Kab. Muna Barat	1 dok	10.502.000	DAU		1 dok	11.552.200
3 25 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan Dokumen RKA-OPD	Kab. Muna Barat	20 kali	1.602.000	DAU		25 kali	1.762.200
3 25 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-OPD	Kab. Muna Barat	20 kali	1.052.000	DAU		25 kali	1.157.200
3 25 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan Dokumen DPA-OPD	Kab. Muna Barat	5 kali	552.000	DAU		6 kali	607.200
3 25 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-OPD	Kab. Muna Barat	5 kali	452.000	DAU		5 kali	497.200
3 25 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen lakip OPD yang disampaikan tepat waktu	Kab. Muna Barat	24 kali	1.988.000	DAU		25 kali	2.186.800
3 25 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rapat evaluasi kinerja internal OPD	Kab. Muna Barat	12 kali	12.000.000	DAU		12 kali	13.200.000
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan	Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu			1.791.601.641				1.970.761.805
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang penerima gaji dan tunjangan pada tahun berjalan.	Kab. Muna Barat	20 orang	1.684.201.641	DAU		24 orang	1.852.621.805
3 25 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan penatausahaan dan verifikasi keuangan OPD	Kab. Muna Barat	12 bulan	105.600.000	DAU		12 bulan	116.160.000
3 25 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi OPD	Kab. Muna Barat	4 kali	400.000	DAU		6 kali	440.000
3 25 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Kab. Muna Barat	4 kali	400.000	DAU		5 kali	440.000
3 25 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase temuan yang ditanggapi	Kab. Muna Barat	100 %	200.000	DAU		100 %	220.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 25 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen Laporan Keuangan Berkala OPD	Kab. Muna Barat	4 kali	400.000	DAU		5 kali	440.000
3 25 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis yang disampaikan tepat waktu	Kab. Muna Barat	4 dok	400.000	DAU		4 dok	440.000
3 25 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keberadaan Laporan Barang Milik Daerah OPD yang disampaikan tepat waktu			927.100				1.019.810
3 25 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Kebutuhan barang milik OPD	Kab. Muna Barat	1 dok	200.000	DAU		1 dok	220.000
3 25 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang dan aset milik OPD yang diamankan	Kab. Muna Barat	100 %	65.000	DAU		100 %	71.500
3 25 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi inventaris barang	Kab. Muna Barat	2 kali	200.000	DAU		2 kali	220.000
3 25 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan barang milik daerah	Kab. Muna Barat	2 kali	223.850	DAU		2 kali	246.235
3 25 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang yang terekonsiliasi	Kab. Muna Barat	1 dok	222.500	DAU		1 dok	244.750
3 25 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen barang milik OPD yang tertata dengan baik	Kab. Muna Barat	1 dok	15.750	DAU		1 dok	17.325
3 25 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang teradministrasi dengan baik			2.612.500				2.873.750
3 25 01 2.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase sosialisasi dan penyerbaluasan informasi retribusi	Kab. Muna Barat	90 %	1.545.000	DAU		90 %	1.699.500
3 25 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase jumlah obyek retribusi terinventarisir	Kab. Muna Barat	90 %	1.022.500	DAU		90 %	1.124.750
3 25 01 2.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase pengelolaan data retribusi daerah	Kab. Muna Barat	90 %	22.500	DAU		90 %	24.750
3 25 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pengelolaan retribusi daerah	Kab. Muna Barat	90 %	22.500	DAU		90 %	24.750
3 25 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik			20.492.500				541.750
3 25 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN beserta atribut dan kelengkapannya yang tersedia	Kab. Muna Barat	20 pasang	20.000.000	DAU		24 pasang	22.000.000
3 25 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pengelolaan data administrasi kepegawaian	Kab. Muna Barat	100 %	22.500	DAU		100 %	24.750

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 25 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan koordinasi dan persentase pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Muna Barat	4 kali	400.000	DAU		5 kali	440.000
3 25 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja ASN	Kab. Muna Barat	12 kali	70.000	DAU		12 kali	77.000
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan			607.088.419				667.797.261
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Kab. Muna Barat	1 paket	5.000.000	DAU		1 paket	5.500.000
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kab. Muna Barat	1 paket	57.000.000	DAU		1 paket	62.700.000
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Kab. Muna Barat	1 paket	70.000.000	DAU		1 paket	77.000.000
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan bahan cetakan dan penggandaan	Kab. Muna Barat	100 %	2.000.000	DAU		100 %	2.200.000
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Kab. Muna Barat	12 eks	16.920.000	DAU		12 eks	18.612.000
3 25 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dan jenis Bahan / Material yang tersedia	Kab. Muna Barat	1 paket	25.677.419	DAU		1 paket	28.245.161
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti	Kab. Muna Barat	50 kali	416.591.000	DAU		50 kali	458.250.100
3 25 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem berbasis elektronik pada OPD	Kab. Muna Barat	100 %	13.900.000	DAU		100 %	15.290.000
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia			67.600.000				74.360.000
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah daya listrik yang dibayarkan (KWh)	Kab. Muna Barat	1 paket	10.000.000	DAU		1 paket	11.000.000
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Muna Barat	100 %	57.600.000	DAU		100 %	63.360.000
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / jabatan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK			35.381.250				22.000.000
3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / jabatan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK	Kab. Muna Barat	1 paket	10.000.000			1 paket	11.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional / lapangan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK	Kab. Muna Barat	1 paket	5.000.000	DAU		1 paket	5.500.000
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis perlatan dan mesin yang terpelihara	Kab. Muna Barat	1 paket	3.000.000	DAU		1 paket	3.300.000
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Kab. Muna Barat	1 paket	12.000.000	DAU		1 paket	13.200.000
3 25 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Kab. Muna Barat	1 paket	5.381.250	DAU		1 paket	5.919.375
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	% peningkatan produksi perikanan tangkap		10 %	1.999.350.000			5 %	2.199.285.000
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	% pengelolaan penangkapan ikan yang tercatat			1.779.350.000				1.957.285.000
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Data dan Informasi Perikanan tangkap		1 dok	38.800.000	DAU		1 dok	42.680.000
3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah dan Jenis Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		2 paket	1.107.000.000	DAU		2 paket	1.217.700.000
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah dan Jenis Sarana Usaha Perikanan Tangkap		5 paket	633.550.000	DAU		5 paket	696.905.000
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Nelayan Kecil yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan			84.000.000				92.400.000
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		4 paket	34.000.000	DAU		4 paket	37.400.000
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah dan Jenis Kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		4 paket	50.000.000	DAU		4 paket	55.000.000
3 25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	% Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			136.000.000				149.600.000
3 25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan TPI		2 paket	136.000.000	DAU		2 paket	149.600.000
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	% peningkatan produksi perikanan budidaya			999.900.000				1.099.890.000
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan			30.000.000				33.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudi Daya Ikan yg meningkat kapasitasnya		40 orang	30.000.000	DAU		40 orang	33.000.000
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	% Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			969.900.000				1.066.890.000
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan		1 dok	14.900.000	DAU		1 dok	16.390.000
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan yang tersedia		4 paket	600.000.000	DAU		4 paket	660.000.000
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan yang tersedia		4 paket	350.000.000	DAU		4 paket	385.000.000
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembinaan/pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		1 paket	5.000.000	DAU		1 paket	5.500.000
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	% peningkatan produksi perikanan			10.000.000				11.000.000
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya			10.000.000				11.000.000
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan/Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		1 paket	5.000.000	DAU		1 paket	5.500.000
3 25 05 2.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan/Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		1 paket	5.000.000	DAU		1 paket	5.500.000
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	% peningkatan produksi olahan hasil perikanan		5 %	375.600.000			3 %	413.160.000
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Dokumen			11.000.000				12.100.000
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan		1 dok	11.000.000	DAU		1 dok	12.100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dan Jenis Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			109.600.000				120.560.000
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Bimtek/Pelatihan/Keg		3 keg	109.600.000	DAU		3 keg	120.560.000
3 25 06 2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang bermutu			255.000.000				280.500.000
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis Fasilitas Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang tersedia		4 paket	255.000.000	DAU		4 paket	280.500.000

RENJA SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022

Tabel T – C.33.di atas memperlihatkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan berpedoman pada 5 Program utama yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan, dan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Dalam menunjang program dan kegiatan tersebut, memerlukan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 5.938.701.410,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) yang keseluruhannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Penutup

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2022, merupakan dokumen yang disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi wilayah kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat yang disinkronkan dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Pusat.

Renja ini diharapkan bisa menjadi acuan yang konsisten untuk dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya yaitu RKA dan DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2022. Hal ini penting untuk mengimplentasikan konsep perencanaan yang *bottom up*, yang dapat mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Muna Barat, namun tetap berpegang pada rambu-rambu kebijakan yang telah ditetapkan.

Bila nanti dalam pelaksanaannya, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka akan dilakukan :

- Pengurangan volume kegiatan
- Kegiatan yang kurang anggarannya dan belum terlalu prioritas akan dialihkan pada kegiatan lain yang juga kurang anggarannya namun sangat dibutuhkan pada tahun berjalan
- Selanjutnya bila memungkinkan kami bermohon untuk mendapatkan tambahan alokasi anggaran, sehingga kegiatan prioritas yang di usulkan oleh masyarakat dapat dialokasikan sesuai dengan persyaratan teknis kegiatan.

Akhirnya dengan dukungan seluruh *stakeholder* dalam pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan dapat mendorong tercapainya Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat.

Laworo, 08 April 2021

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Muna Barat



F. H. LA DJONO

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c

NIP.19631231 199203 1 119